



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRMAWATI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Kurang Sejahtera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISMAIL NASUTION, SH, Sp.N
Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalui supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Juni 2018

Pihak Kedua :

**Kepala Bagian Pengembangan
Ekonomi Daerah**

**ISMAIL NASUTION, SH, Sp.N
PEMBINA
NIP. 19640319 198502 1 001**

Pihak Pertama :

**Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi
dan Masyarakat Kurang Sejahtera**

**IRMAWATI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19640908 198602 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN MASYARAKAT KURANG SEJAHTERA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengendalian kebijakan nasional di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), alokasi pupuk bersubsidi, pengendalian inflasi daerah (TPID), penyaluran raskin dan pengawasan garam.	1. Teraksesnya layanan jasa keuangan formal kepada masyarakat dan UMKM dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 2. Terlaksananya penyaluran Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sumut. 3. Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan sertifikasi tanah UKM. 4. Termotivasinya Kab/Kota untuk menyalurkan Raskin/Rastra tepat waktu, tepat pembayaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat sasaran. 5. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan KUR, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja.	25 Kabupaten/ Kota 32 Kabupaten/ Kota 15 Kabupaten/ Kota 33 Kabupaten/ Kota 15 Kabupaten/ Kota

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | Rp. 74.129.856 |
| 2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin/Rastra di Sumut. | Rp. 119.964.730 |
| 3. Monitoring dan Evaluasi kelompok kerja lintas sektor untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan usaha mikro dan kecil | Rp. 100.349.984 |
| 4. Penilaian dan Penganugerahan Raskin Award Tahun 2017 dari Gubernur kepada Bupati / Walikota | Rp. 124.576.789 |
| 5. Monitoring dan Evaluasi KUR di Sumatera Utara | Rp. 77.559.320 |

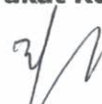
Medan, Juni 2018

**Kepala Bagian Pengembangan
Ekonomi Daerah**



ISMAIL NASUTION, SH, Sp.N
PEMBINA
NIP. 19640319 198502 1 001

**Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi
dan Masyarakat Kurang Sejahtera**



IRMAWATI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19640908 198602 2 002

Mengetahui,

**KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU**



ERNITA BANGUN, SE, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002